



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 8 Juli 2020
Waktu	:	13.15 WIB – 15.27 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN
Acara	:	Pembahasan terkait Mendapat masukan terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi Listrik, BBM dan Gas.
Ketua Rapat	:	I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM - PDIP
Sekretaris Rapat	:	Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Hadir Anggota	:	Anggota BAKN DPR RI <ol style="list-style-type: none">1. F-PKS - Ahmad Syaikhu2. F-P. Golkar - H.M Misbakhun, SE., M.H3. F-PKB - H. Bachrudin Nasori, S.Si, M.M4. F-PAN - Ahmad Najib Qodratullah, S.E5. F-P. Nasdem - Sugeng Suparwoto6. F-P. Demokrat – Marwan Cik Asan7. F-PAN – Ahmad Najib Qodratullah, S.E.
Undangan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI)2. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)3. DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu, Namo buddhaya salam kebajikan untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini kita semua semoga diberikan kesehatan dan sehat *walafiat* semuanya sehingga kita bisa bertemu untuk menyampaikan secara pendapat terkait dengan BBM, masalah subsidi energi BBM dan gas.

Sebelumnya Yang saya hormati ketua umum DPP HNSI, Mayjen TNI Marinir purnawirawan Yussuf Solichien beserta jajarannya. Terima kasih Pak Bapak sudah hadir.

Yang saya hormati juga Saudara Ketua Umum PNTI Pak H. E Purnomo beserta jajaran. Selamat siang mas.

Kemudian yang saya hormati saudara Ketua DPN HKTI ini seharusnya beliau itu duduk di samping saya.

Beliau ini aktif di Komisi XI dulu kan. Ir. Sadar Subagyo beserta jajarannya.

Pimpinan dan anggota BAKN, Pak Syaikhu dan anggota BAKN yang nanti lainnya akan menyusul.

Perlu saya sampaikan bahwa menurut Peraturan Tata Tertib No. 1 tahun 2020 yang disebutkan dalam Pasal 254 ayat 4 sesuai jenis rapat DPR dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu yakni bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya *urgensi* nasional. Rapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Dan ayat 5 disebutkan dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat 4, kehadiran anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 anggota untuk setiap fraksi kecuali ditentukan lain oleh pimpinan DPR. Dan ayat 6 disebutkan dalam hal kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dapat terpenuhi semua jenis rapat DPR tetap sah meskipun dihadiri oleh Pimpinan dan anggota secara virtual.

Kemudian dalam pasal 274 ayat 1 menyebutkan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus atau Alat Kelengkapan DPR lainnya dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta. Dan ayat 3 disebutkan bahwa perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Sekretariat BAKN DPR RI, RDPU BAKN DPR RI secara fisik dan virtual diikuti oleh baru dua, nanti akan menyusul karena jumlah anggota BAKN ini 9 orang. Anggota BAKN DPR RI yang terdiri lebih dari separuh unsur fraksi. Namun mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum ini tidak memerlukan kuorum dari anggota BAKN maka Izinkanlah saya membuka Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini dan rapat hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.15 WIB)

**Saudara Pimpinan dan anggota BAKN yang saya hormati,
Saudara Ketua Umum DPP HNSI,
Mayjen TNI Marinir Purnawirawan Yussuf Solichien,
Yang saya hormati saudara Ketua Umum PNTI saudara H. E Purnomo,
Kemudian yang saya hormati Ketua DPN HKTI, Ir. Sadar Subagyo.**

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini dalam rangka mendapat masukan dalam rangka kami mendapatkan masukan terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi BBM dan Gas. Secara teknis pelaksanaan tugas BAKN terdapat dalam Undang-undang No. 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 112 ayat D 1 menyebutkan BAKN bertugas:

- a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.
- b. Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi.
- c. Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi dan
- d. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan, hambatan pemisahan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Selanjutnya sebelum kita melakukan pendalaman materi akan kami sampaikan dan perkenalkan anggota di BAKN. Saya sendiri dalam hal ini ditugaskan Pimpinan anggota BAKN I Gusti Agung Rai Wirajaya dari Daerah Pemilihan Bali dari Fraksi PDIP Perjuangan. Di sebelah kiri saya Bapak Ahmad Syaikhul dari PKS, Dapil Jawa Barat VII. Dan anggota yang lain nanti akan menyusul lebih lanjut Pak karena di sini 9 orang masing-masing fraksinya 1.

Kemudian terkait dengan tema rapat kita pada hari ini maka kami telah mengirimkan TOR dan daftar pertanyaan untuk pelaksanaan RDPU ini yang mana di dalamnya terdapat beberapa hal yang ingin kami dalami terkait Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi ini yaitu BBM dan gas.

Demikian kami dari Pimpinan. Selanjutnya kami persilakan dari Ketua Umum DPN HKTI, sahabat saya bapak yang sudah sadar dari sebelumnya. Silakan Pak Sadar Subagyo lebih dulu.

KETUA UMUM HKTI (Ir. SADAR SUBAGYO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Yang kami hormati yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak anggota DPR BAKN,
Yang saya hormati rekan dari HNSI Pak Mayjen Yussuf, dan Dari HTNI juga.**

Menjawab pertanyaan Bapak ini jawabannya panjang Pak tapi saya coba ringkas saja Pak. Pada dasarnya secara umum petani tidak kesulitan

mendapatkan BBM yang bersubsidi secara umum. Tetapi kesulitan yang muncul adalah lokasi untuk mendapatkan itu jauh Pak. Sehingga akhirnya yang diperoleh barang yang mahal. Petani adanya di desa, SPBU adanya di kecamatan. Nah untuk mendapatkan ini kalau yang punya traktor *ngantri* di SPBU *ngantrinya* lama, kalau yang tidak punya traktor juga untuk ke SPBU itu ya sampai 20 KM. Jadi ya praktis akhirnya mereka membeli solar dengan harga sampai 1000-1500 lebih tinggi dari harga SPBU itu yang terjadi.

Yang kedua ketika mereka dapat membeli di SPBU itu kucing-kucingan Pak. Kan enggak mungkin mereka beli yang penggilingan padi, penggilingannya dibawa kan tidak mungkin. Yang traktor besar mau beli ini juga tidak mungkin *ngantri*, traktornya *dugudukguduk*. Akhirnya mereka beli dalam bentuk *drigenan*. Nah dalam bentuk *drigenan* ini kucing-kucingan. Iya kadang bisa, kadang SPBU juga takut melayani *drigenan*. Ini terus terang rada-rada. Iya kalau bisa sih kami itu mengusulkan ringkasnya itu mungkin kah sekarang ini ada *bed* Pertamina ya, Pom Bensin mini-Pom Bensin mini.

Dalam kesempatan dan forum yang baik dan forum yang terhormat ini kami mohon wakil-wakil kami dapat *mengendorse* agar Dana Desa, sebagian dari Dana Desa itu digunakan untuk membangun Pertamina sehingga BBM tersedia di setiap desa. itu dapat dikelola oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) ataupun oleh BUMDes. Ini akan sangat membantu kami Pak. Kalau ini belum terwujud, kami mohon agar identitas Kartu Tani dapat juga dipakai untuk membeli BBM yang bersubsidi di Pom bensin. Sekarang dapat membeli tapi mesti harus ada keterangan dari Lurah, dari Camat mengenai usaha taninya.

Untuk yang usaha tani seperti peternakan, pompa air, pompa air ini kan jalannya kalau musim kemarau Pak, dan itu bukan usaha tani. Iya tidak ada keterangan usaha taninya. Tapi di sisi lain kan identitas petani sudah ada dalam bentuk Kartu Tani. Mohon kiranya ada kebijakan bahwa Kartu Tani dapat dipakai sebagai identifikasi petani untuk dapat membeli di Pom bensin menggunakan jerigen. Mengenai besarnya supaya tidak diselewengkan, tentu kan Desa tahulah. Kami bisa ini kan seandainya kita traktor roda 2, kira-kira butuhnya cuma 10 liter per hari, atau 7 liter. Traktor roda 4 butuhnya 30-35 liter. Pompa air kira-kira 10 liter per hari. Penggilingan kira-kira 40 liter per hari. Ini cukup dengan jerigen.

Nah dalam kesempatan ini juga kami mohon agar dilakukan revisi terhadap Perpres No. 191 tahun 2014 Jucto Perpres No. 43 tahun 2018 terkait luasan lahan yang dapat memperoleh subsidi yaitu baik individu maupun kelompok disebutkan maksimal luas lahannya adalah 2 hektar. Ini menyulitkan kami. Padahal rata-rata kelompok itu memiliki luasan 25 hektar atas nama kelompok membeli ini berbenturan dengan Perpres.

Jadi mohon agar ada revisi terhadap Perpres. Mohon juga diberikan kemudahan supaya kami tidak membeli, yang dibeli bahan bakar subsidi tetapi harganya sudah naik 1500. Karena kami enggak boleh beli dengan jerigen. Kalau Bapak jalan, saya pernah jalan Pak dari Lampung sampai ke Padang, itu hampir, di depan Pom bensin ada kios-kios bensin, eh ada kios-kios solar. Itu kan Pom Bensin yang menyediakan berjerigen-jerigen. Saya tidak tahu itu milik siapa tapi kami petani-petani *milih* beli di situ, tidak perlu antre langsung bisa dapat 40 liter, 60 liter. Kalau beli di Pom Bensin sudah antre, ditanya ini itu.

Mohon sekali ini juga kesempatan yang sangat baik. Terima kasih sudah, kami dimintai pendapatnya ini barangkali baru pertama kali ini BAKN mengundang kami. Terima kasih yang setulus-tulusnya dan dari kami salam dari para petani. Semoga Bapak-bapak semuanya tambah sehat, tambah sejahtera,

dan semoga juga kami lolos dari krisis ini. Ceritanya banyak Pak sekarang. Produksi melimpah enggak ada yang beli, enggak ada yang beli. Jadi tapi karena di sini bahan bakar ya kami sampaikan dulu mengenai bahan bakar. Kami ulangi, kami dapat memperoleh bahan bakar subsidi tapi tidak dengan harga subsidi. Kami mohon agar bisa membeli di Pom Bensin dengan bentuk jerigen, identitas Kartu Tani.

Kedua kami mohon juga ada kebijakan agar di setiap desa dibangun Pertamina-Pertamina. Dan ketiga kami mohon dilakukan revisi terhadap Perpres No. 191 agar terkait luasan lahan maksimal yang memperoleh subsidi adalah 2 hektar baik individu maupun kelompok. Terima kasih. Dari kami seperti ini, mudah-mudahan aspirasi kami diterima Pak Rai. Salam sekali lagi dari Tani.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalai-kumsalam.

Terima kasih banyak. Pak Sadar ini rupanya petani juga sudah sadar semua membutuhkan BBM yang *simple* dengan identitas petani.

KETUA UMUM HKTI (Ir. SADAR SUBAGYO):

Boleh saya sampaikan?

KETUA RAPAT:

Oh iya boleh dengan senang hati Pak.

KETUA UMUM HKTI (Ir. SADAR SUBAGYO):

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Itu tadi sudah disampaikan dan sudah diserahkan kepada kami hal-hal yang terkait dengan BBM dan usulan-usulan dimana perlu diperbanyak dalam hal ini (suara tidak jelas) di desa-desa mungkin bisa kerja sama dengan BUMDes kemudian dengan Gapoktan. Ini kelihatan *simple* tapi banyak sekali yang harus dikerjakannya. Usulannya sedikit tapi rangkaianannya akan panjang. Terima kasih Pak Sadar sahabat saya.

Kami persilakan dari Himpunan Nelayan. Silakan Pak.

KETUA UMUM HNSI (Dr. H. YUSSUF SOLICHEN):

**Yang terhormat Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI,
Yang terhormat Bapak-Ibu anggota DPR RI yang hadir,
Rekan-rekan saya Ketua Umum (suara tidak jelas) Jenderal pengurus HKTI,
juga PNTI yang saya banggakan.
Teman-teman pengurus DPPN HSI Bapak-Ibu sekalian.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas rahmat dan karunia Nya kita tetap sehat Pak, semangat dalam meneruskan perjuangan untuk kita sendiri, untuk keluarga untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Karena badan ini adalah pada tataran strategis serta tataran kebijakan, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak-bapak bukan hanya masalah BBM tapi tataran kebijakan inilah yang harus kita tata. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pendahuluan saya.

Yang pertama saya ingin mengutip pesan dari *founding father* kita. Beliau mengatakan, Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan sehingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Barangkali ini, ini amanat dari *founding father* kita bahwa laut kita ini harus dikelola dengan baik.

Kemudian kalau kita lihat berikutnya sasaran strategi. Penggunaan APBN tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa penggunaan APBN ini diarahkan kepada pertama ada manfaat ekonomi di situ, kemudian ada manfaat sosial dan juga kesejahteraan. Percuma saja bapak-bapak DPR dengan Pemerintah membuat kebijakan kalau tidak sesuai dengan amanat ini Pak. Oleh karena itu kami mohon ini menjadi acuan kita.

Selanjutnya sebelum saya menginjak kepada yang berikut, saya ingin juga Pak Ketua dan Bapak-bapak yang terhormat anggota DPR mungkin sedikit. Himpunan Nelayan Indonesia ini diresmikan 21 Mei 1973 oleh Presiden RI dan kita ada di 34 DPD provinsi ada 459 DPC HNSI tingkat kabupaten/kota ada ranting-ranting HNSI, kecamatan dan rukun nelayan. Jadi mohon izin Pak kalau tidak salah katanya Bapak dari Demokrat ya Pak sama PKS? Mungkin kita sama Pak, partai politik bersama dengan kita. Ada di DPD nya, ada di provinsi, ada kabupaten/kota sampai desa-desa.

Kemudian misi kita sesuai dengan kesempatan ini adalah mewujudkan nelayan Indonesia yang sehat, berpendidikan dan sejahtera.

Bapak Ibu sekalian,

Mungkin dalam sekarang masih berlaku bahwa kalau orang mendengar nelayan itu mesti kurus, kering, *item*, jelek gitu, tidak sehat gitu ya, tidak berpendidikan dan terbelakang. Oleh karena itu kita berupaya HNSI ini untuk merubah *image* itu, merubah stigma itu menjadi pelayan yang sehat, berpendidikan dan sejahtera. Kita juga punya misi bisa dibaca oleh Bapak-Ibu sekalian, intinya bahwa kita adalah dibangun, dikembangkan HNSI ini untuk memberdayakan, meningkatkan pendapatan meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memberikan advokasi Ormas di penyuluhan-penyuluhan dan modernisasi kapal nelayan.

Kemudian saya ingin juga sekilas Bapak-Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana potensi maritim kita ini. Dari Perikanan saja hampir 100 milyar USD. Hampir separuhnya APBN kita ini bisa dari perikanan sebenarnya. Kemudian kita lihat sektor perikanan sendiri. Kita potensi kita Bapak-Ibu sekalian, itu 71,1 juta tangkap maupun (suara tidak jelas). Tapi kinerja kita itu yang 2018 itu hanya 15,5 juta ton. Ini kaitannya dengan BBM nanti. Tapi saya ingin menyampaikan kinerja

kita masih jauh dari harapan. Potensi kita 71 juta ton per tahun tapi KKP catatan terakhir itu baru 15 juta.

Kemudian saya ini juga mengajak Bapak-ibu sekalian, kita lihat, kita tidak boleh katak dalam tempurung. Kita juga ini lihat keluar, coba kita lihat China. China garis pantainya 32.000 KM, sedangkan Indonesia itu 95.000 KM. Nah mereka, kinerja mereka itu bisa menghasilkan 55 juta ton per tahun sementara Indonesia hanya 15,5 juta ton per tahun.

Bapak-ibu sekalian.

Tolong bapak ketua. Mengapa China sedemikian hebatnya dia (suara tidak jelas) karena mereka subsidi BBM dan subsidi kapal ikan itu diberikan. Jadi nelayan-nelayan China itu sebelum membangun kapal diberikan subsidi 50% untuk bangun kapal. Kemudian setelah melaut dia diberikan subsidi 50% untuk BBM. Sehingga dan subsidi ini tidak hanya dibatasi.

Kalau di Indonesia sekarang dibatasi 30 GT saja ke bawah, tapi China semuanya yang 1000 GT diberi subsidi. Kalian cari kedung itu sumber daya ikan, di seluruh dunia sampai Antartik, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, tapi kita berkutat di lokal saja nelayan kita 3 GT, 5 GT, 10 GT. Nah ini yang bisa saya sampaikan karena Bapak-bapak adalah tangan-tangan kebijakan. Mengapa China sedemikian hebatnya produksinya sampai 55 juta sementara kita 15 juta ton ini.

Bapak-ibu sekalian.

Kita lihat wilayahnya ini. Tadi saya katakan nelayan-nelayan kita tadi Pak Ketua, ini hanya sekitar kita dalam-dalam sini saja karena dia hanya 5, 10 GT dan sebagainya. Yang laut lepas GT ini masih dikuasai oleh asing, termasuk ya China itu yang maling-maling ke tempat kita ini. Vietnam, Thailand sampai saat ini masih marak. Karena belum tertangkap saja gitu oleh Angkatan Laut.

Nah nelayan miskin. Nanti saya lihat ini mengapa miskin ya hanya 2 saja. *Knowledge* sama akses. Ketika nelayan tidak punya pengetahuan, pengetahuan tentang kapal, tentang alat tangkap, tentang teknologi penangkapan ikan, tentang teknologi *handling* ikan. Dan dia tidak punya akses, akses permodalan, akses informasi, akses pengetahuan, maka dia miskin. Akses kesehatan, akses pendidikan, nah dia akan tetap miskin.

Oleh karena itu Undang-undang No. 7 tahun 2016 mengatakan bahwa nelayan kecil karena nelayan punya kapal di bawah 10 GT. Apa buktinya nelayan masih miskin Pak Ketua dan Bapak-Ibu sekalian? Kita lihat ini, kita lihat struktur kapal perikanan Pak Ketua. Dari 625.000 unit itu 597.000 itu nelayan di 10 GT itu. Nelayan-nelayan kecil saja. Berarti 95% nelayan kita masih miskin. Ini Kementerian KKP enggak bisa menghindar karena ini data dan ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam bahwa yang dikatakan nelayan kecil adalah yang di bawah 10 GT. Nyatanya seperti ini, (suara tidak jelas) masih miskin. Oleh karena itu, ini memang kita masih butuh BBM subsidi.

Bapak-ibu sekalian.

Kemudian yang klasik. Saya katakan klasik ya mungkin sama lah dengan teman-teman HKTI Pak ya. Ini masalah permodalan, masalah BBM, masalah hukum dan sebagainya. Tapi kita akan bicara masalah yang tengah ini saja, masalah BBM. Mengapa nelayan masih memerlukan subsidi BBM? Nah ini kita lihat di sini. Yang pertama saya iri Pak Ketua dengan sebelah saya ini Pak. Jadi petani itu Pak, negara itu memberikan puluhan triliun untuk beliau-beliau ini, untuk petani itu. Ada subsidi pupuk, subsidi (suara tidak jelas), subsidi pangan, tapi sejak republik ini berdiri, belum pernah negara memberikan subsidi buat nelayan Pak. BBM ini sama dengan rakyat yang lain, bukan khusus untuk nelayan. Nah itu mengapa kita ingin juga nelayan ada subsidi khusus.

Kemudian yang kedua, mengapa disubsidi? Tadi saya jelaskan 96% nelayan kita masih miskin. Dengan subsidi itu akan menambah penghasilan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Contohnya di sini saya jelaskan, seorang nelayan yang melaut dengan kapal 5 GT.

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Begini Pak. Saya interupsi sedikit Pak Ketua. Sedikit saya mau Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Misbakhun.

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Pak, kategori miskin Bapak ini apa Pak? Mengatakan bahwa 96% nelayan Indonesia masih miskin. Karena kan kita harus hati-hati Pak dengan pengertian miskinnya itu kategorinya apa. Terus kemudian dari 96% ini berapa totalnya dalam kuantifikasi nya? Karena kalau kita kemudian mengatakan, berarti kan nelayan kita ini baru 4% saja Pak. Nah ini kan kita-kita juga harus lihat nelayan ini nelayan apa? Nelayan tangkap, nelayan budidaya atau nelayan apa?

Karena Bapak lah yang dengan segala hormat saya kepada HNSI, karena bapak lah yang tahu berapa jumlah. Karena data Bapak ini nanti akan penting buat kita sebagai masukan, penting. Berapa total nelayan nya? Yang 96% ini? Karena ini bisa kita sampaikan Pak kepada Pemerintah, nelayan Indonesia masih miskin. Isunya Bapak luar biasa tadi, tidak ada subsidi khusus terhadap BBM, terhadap itu.

Nah miskinnya, pengertian miskin menurut Bapak ini apa? Karena kalau kita dalam parameter-parameter yang jelas, miskinnya apa. Kalau Bapak mengatakan 96%, berapa? Apalagi *breakdown* misalnya kategori miskinnya apa, dari 96 itu berapa persen nelayan tangkap, nelayan budidaya dan sebagainya.

Nah inilah Pak yang begitu kita bicara soal data, (suara tidak jelas) yang, ukuran-ukuran yang kita sampaikan harus kemudian, itu yang akan menjadi dasar itu Pak. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kami yang baru hadir, yang bicara tadi adalah Pak Muhammad Misbakhun dari Fraksi Golkar

Daerah Pemilihan Jawa Timur II. Sedangkan di sebelahnya Pak Ahmad Najib Qodratullah dari PAN, Jawa Barat II.

Kami persilakan Pak, kalau Bapak mau jawab apa yang disampaikan, silakan.

KETUA UMUM HNSI (Dr. H. YUSSUF SOLICHEN):

Menjawab atau melanjutkan Pak?

KETUA RAPAT:

Melanjutkan dulu sambil Bapak menjawab.

KETUA UMUM HNSI (Dr. H. YUSSUF SOLICHEN):

Oh melanjutkan dulu ya. Terima kasih. Nanti kami jawab Pak ya. Kami lanjutkan dulu.

Ini contoh kalau nelayan tidak diberikan subsidi BBM. Kan dia melaut dengan butuh BBM 100 liter. Kalau dia beli BBM subsidi katakanlah per hari ini ada 7 ribu, padahal kalo subsidi hanya 5150, biaya operasinya kalau BBM Rp. 7.000 dia Rp. 700.000, kemudian logistiknya (suara tidak jelas) maka dia biaya operasinya 1.100.000. Pendapatan kalau dia 50 kilo ikan, kali katakanlah asumsinya Rp. 25.000 per kilo, dia 1,250. Sehingga keuntungannya Rp. 150.000 untuk 3 orang ABK untuk 5 GT ini.

Nah kalau yang bisa beli BBM subsidi 5.150, maka akan dapat tambahan dia perbedaan antara 7000 dengan (suara tidak jelas) Rp. 1155 sehingga dia akan menjadi dua. Nah ini pun kalau dia 3 orang 25 hari ke laut, maka dia hanya dapatkan 2 juta perbulan. 2 juta ini jauh dari UMR. Kalau DKI sekarang sudah 4,2 sampai 4,4. Nah ini masih jauh dari UMR. Oleh karena itu dengan subsidi pun nelayan kita masih kurang jadinya, ini hanya ilustrasi saja.

Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian kami ingin memberikan ini kebutuhan, ini kebutuhan. Kalau sekarang yang diberikan subsidi adalah di bawah 30 GT hanya pada posisi ini. Di atas 30 GT tidak diberikan subsidi. Tapi kalau itu termasuk, maka jumlahnya itu 8,3 juta kl per tahun. Nah sekarang kalau di 30 GT ke atas dikeluarkan seperti saya katakan tadi, di China itu tidak menang GT, semua dikasih subsidi. Sehingga mereka bisa melaut ke mana-mana. menguasai Samudra Hindia, Samudra (suara tidak jelas) sampai Atlantik. Nah kita hanya diberikan di bawah subsidi, itu pun 7,3 juta. Nah alokasi yang diberikan BPH Migas untuk tahun 2020 hanya kira-kira 2 juta sehingga masih kurang. Nah inilah yang saya katakan, mungkin ada subsidi khusus untuk nelayan sehingga bisa menjangkau.

Kemudian kita lihat berikutnya. Kalau kita hitung katakanlah kalau misalnya tadi seluruhnya 8 juta, separuh saja didukung, didukung, maka negara hanya mengeluarkan saya kira 7,6 triliun. Nah katakanlah 7 koma triliun ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan 70,6 triliun subsidi BBM secara keseluruhan. Kita hanya minta ini saja, ini juga enggak bisa. Malah kita hanya diberikan tadi, 2 juta tadi, 2 juta. Padahal yang dibayar oleh Pemerintah adalah perbedaan antara 7.000 dengan 5.150 ini, yang dibayar oleh Pemerintah. Tapi saya tidak tahu

Pertamina mengajukan ke Pemerintah apakah angka ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi hitung-hitungan kami kalau dia harga non subsidi 7000, maka Pemerintah hanya mengeluarkan 7,7 triliun yang kira-kira lebih dari 10% dari alokasi subsidi yang diberikan oleh Pemerintah untuk BBM dan LPG ini. apalagi kita sebagai negara Indonesia yang katanya negara kepulauan terbesar di dunia ini, uang 7,7 triliun ini sangat kecil sekali, begitu ya.

Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan secara umum Pak Ketua, yang pertama *statement* saya adalah nelayan masih sangat membutuhkan subsidi Pemerintah, baik subsidi BBM maupun subsidi untuk nelayan budidaya yang sekarang belum pernah dapat. Subsidi pakan, benih, obat-obatan yang tadi saya sampaikan, sebelah saya petani ini ada subsidi pupuk, ada subsidi benih dan sebagainya dan subsidi pangan yang luar biasa besarnya.

Kemudian penerapan subsidi BBM untuk nelayan sudah tepat walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi bersama. Kemudian kebijakan BBM sangat diperlukan untuk nelayan, perikanan tangkap maupun perikanan budidaya karena 50 sampai 60% biaya operasional untuk BBM. Subsidi BBM sangat membantu meningkatkan penghasilan nelayan, tadi sudah kami jelaskan.

Kemudian dampak terhadap usaha perikanan itu mengurangi biaya operasional, menambah penghasilan nelayan, meningkatkan daya beli masyarakat secara nasional. Artinya kalau nelayan itu penghasilannya bertambah, maka daya beli nelayan itu akan lebih meningkat, gitu. Paling enggak berkontribusi terhadap daya beli nasional.

Kemudian permasalahan yang dihadapi Bapak-Ibu sekalian. Yang jelas tadi BBM sangat kurang, subsidi ini kurang. Kemudian akses terbatas karena SPDN nya kurang, tidak tepat sasaran. SPBU tidak melayani nelayan. Kalau pun melayani di beberapa tempat harus ada rekomendasi. Tidak mungkin kapal-kapal nelayan di angkut ke darat ke SPBU. Kalau pun dia beli di SPBU juga dibatasi dan juga mungkin berhadapan dengan polisi. Kemudian perlunya alokasi khusus untuk nelayan. Nah sementara ini alokasi nelayan itu langsung ke kabupaten/provinsi. Sehingga di kabupaten/provinsi Pertamina se tempat bisa saja yang punya nelayan itu bisa ke pos-pos yang lain. Bisa ke SPBU dan sebagainya. Barangkali ini.

Kemudian yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian. Kuantitas dan kualitas agen penyalur. Penyalur BBM yang ditetapkan oleh BPH Migas hanya 3 perusahaan Bapak-bapak Ibu yaitu Pertamina, AKR dan Perta Surya Niaga. Nah yang terakhir ini sudah tidak beroperasi lagi. Pertamina dan AKR hanya mendukung SPDN-SPDN yang dekat dengan tempatnya saja, sehingga banyak sentra-sentra nelayan yang tidak memiliki SPDN. SPDN ini adalah solar (suara tidak jelas) solar untuk nelayan, diesel untuk nelayan. Artinya SPBU nelayan lah, SPBB adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker, ini untuk nelayan juga.

Nah dari 1104 pelabuhan atau tempat penangkapan ikan baru ada sekarang 350 SPDN dan SPBE. Akibatnya sebagian besar nelayan masih harus membeli BBM non subsidi. Idealnya kalau pelabuhan dan itu ada 2 SPBN iya paling tidak 2000 SPDN. Separuhnya saja paling tidak 1000. Kalau tiap pelabuhan atau (suara tidak jelas) 1 SPDN atau 1 SPBB, paling enggak 1000 kita butuh kan.

Nah kemudian masalah yang kita hadapi adalah untuk mengajukan permohonan membangun SPDN SPBB ini pada Pertamina, Pak Ketua dan yang terhormat anggota DPR yang lainnya, ini sangat sulit Pak, berbelit-belit. Sehingga